

# TESIS

## PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DI DAFTARKAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR :69/PUU-XIII/2015

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**  
**2020**

# PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 69/PUU-XIII/2015

(YoviFebriani, NIM 1820123014, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 107 hlm, 2020)

## ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 69/PUU-XIII/2015 membolehkan calon suami isteri dan suami isteri untuk melaksanakan perjanjian perkawinan. Perjanjian Perkawinannya dibuat dengan akta autentik oleh notaris dan atau dibawah tangan. Perjanjian Perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan dan lainnya. Perjanjian Perkawinan juga merupakan suatu perjanjian yang berlakunya dapat mempengaruhi terhadap peraturan lainnya. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi memberikan norma hukum baru dalam pelaksanaan atau pembuatan Perjanjian Perkawinan dengan perjanjian mana dapat dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan sampai dengan masa perkawinan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul : “Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015”, dan rumusan masalahnya adalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor, 69/PUU-XIII/2015, faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak terlaksananya pelaksanaan perjanjian perkawinan. Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan social legal research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan perjanjian perkawinan baik orang yang beragama Islam maupun non Islam pada prinsipnya terikat pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, perjanjian perkawinan yang telah dibuat harus mendapat pengesahan dari pegawai pencatat perkawinan sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan yang kemudian dicatat dalam akta perkawinan. Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan atau dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu menjadi perjanjian biasa yang tidak mengikat pihak ketertinggalannya, dikarenakan tidak terpenuhinya unsur publisitas. .

Kata kunci : Perjanjian, Perjanjian Perkawinan dan Pendaftaran, Akibat Hukum

## IMPLEMENTATION OF MARRIAGE AGREEMENT THAT IS NOT REGISTERED AFTER THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER: 69/PUU-XIII/2015

(YoviFebriani, NIM 1820123014, Master of Notarial Study Program, Faculty of Law, Andalas University, 107 p.2020)

### Abstract

The decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 69/PUU-XIII/2015 allows prospective spouses and husbands to carry out marriage agreements. Marriage Agreements are made by authentic deed by notary public and or under the hands. The Marriage Covenant is a form of covenant governing the wealth in marriage and others. The Marriage Covenant is also an agreement in effect that may affect other regulations. With the decision of the Constitutional Court gives a new legal norm in the implementation or making of marriage agreements with which agreements can be made before marriage until the period of marriage itself. Based on this, the author conducted a study with the title: "Implementation of Marriage Agreements That Are Not Registered After the Decision of the Constitutional Court Number: 69/PUU-XIII/2015", and the formulation of the problem is How the implementation of marriage agreements after the Decision of the Constitutional Court No.69/PUU-XIII/2015, what factors caused the implementation of the marriage agreement, due to the law on un-registered marriage agreements. The research used is sociological juridical law research using social legal research approach. The results of this study showed that the process of implementing marriage agreements both people who are Muslims and non-Muslims are in principle bound by Article 1320 of the Civil Code concerning the terms of validity of the agreement, the marriage agreement that has been made must be ratified by the registrar of marriage before or at the time of marriage which is then recorded in the marriage certificate. The legal consequences of marriage agreements that are not registered or registered with the authorized agencies for it become ordinary agreements that are not binding on other parties, due to the unfulfilled element of publicity.



Keywords: Agreement, Marriage Agreement and Registration, Legal Consequences